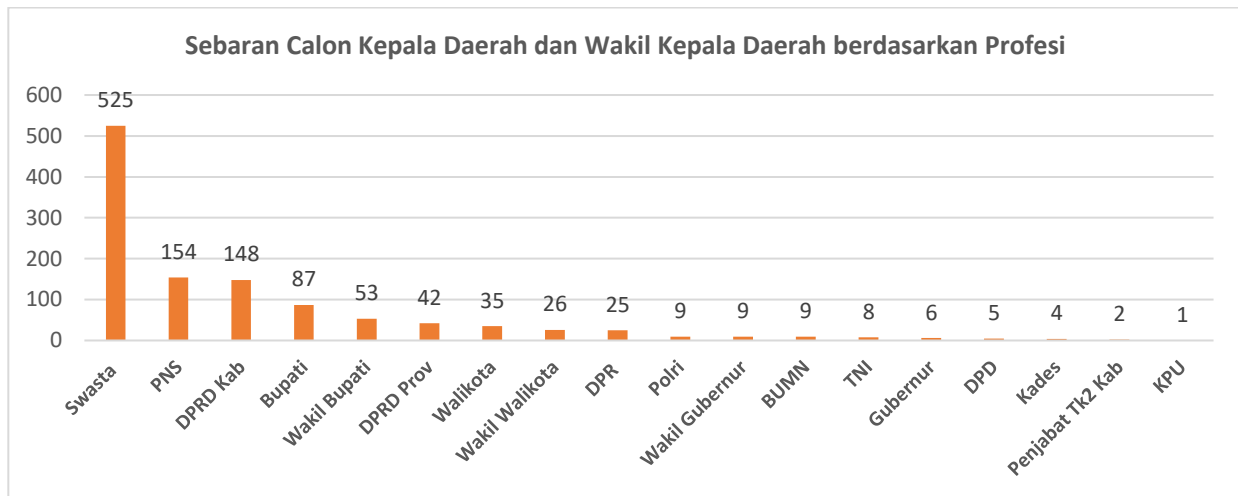


“APBD DI TAHUN POLITIK: EMPAT MODUS POLITISASI *INCUMBNET*”

Oleh: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Pilkada serentak pada tahun 2018 menyajikan 574 pasang calon kepala daerah yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Berdasarkan data olah FITRA, dari 574 pasang calon kepala daerah, 38% merupakan pejabat eksekutif dan legislatif, sedangkan pejabat yang merupakan kepala atau wakil kepala daerah seperti bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, gubernur, dan wakil gubernur mencapai 19%. Pejabat daerah tersebut tidak semua menjadi *incumbnet*, ada juga yang menyalonkan diri ke jenjang lebih tinggi seperti bupati/ walikota mencalonkan menjadi gubernur, atau mencalonkan diri di wilayah lain.



Banyaknya kepala daerah dalam pilkada tentu harus dikawal dengan baik karena berpotensi memanfaatkan jabatan, hal tersebut tentu akan mencoreng nilai demokrasi apa lagi sampai mengorbankan kepentingan publik seperti penyalahgunaan anggaran APBD untuk kepentingan pilkada. Berikut adalah modus-modus *incumbent* atau pejabat publik pada tahun politik:

1. *Mark down* PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Calon kepala daerah yang berasal dari pejabat publik terutama *incumbent*, berpotensi memanfaatkan APBD untuk kepentingan pilkada, seperti *me-mark down* pendapatan asli daerah (PAD) untuk modal kemenangan. Walaupun banyak faktor yang membuat PAD menurun, tetapi kita juga patut mengawasi daerah yang terjadi penurunan PAD menjelang tahun politik, apa lagi penurunan PAD tersebut signifikan.

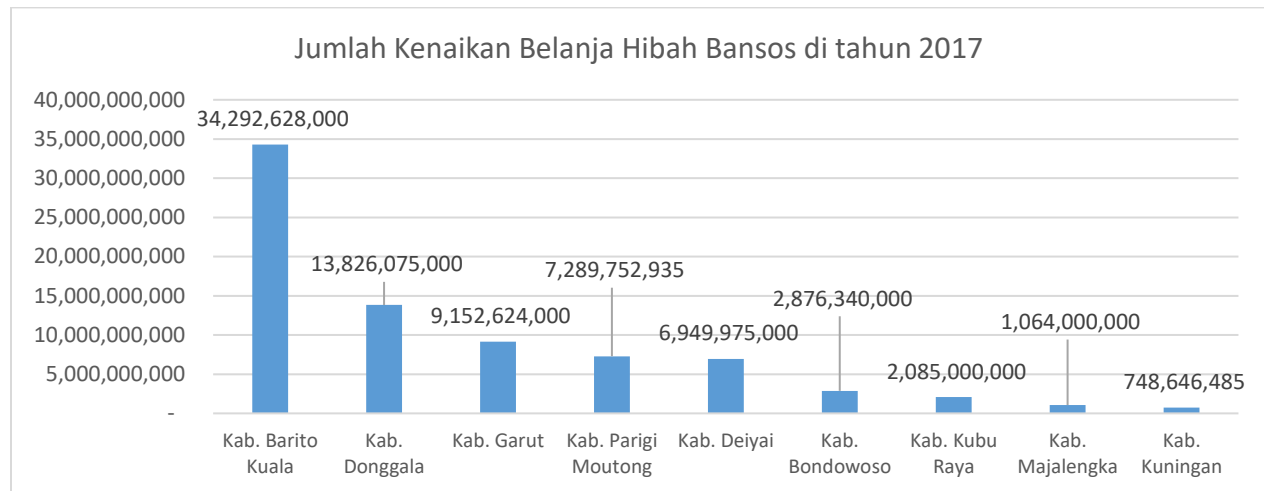
Berdasarkan data olah FITRA di provinsi peserta pilkada, rata-rata mengalami penurunan PAD mencapai 7% dari total belanja pada tahun anggaran 2017. Sedangkan berdasarkan nilai penurunan Prov Jawa barat, Prov Jawa Timur, dan Prov Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki nilai penurunan terbesar rata-rata mencapai Rp 7,2 miliar. (LAMPIRAN 1).

sedangkan, Kota Bandung pada tahun 2016 memiliki PAD sebesar 2.153 miliar, di tahun 2017 hanya mencapai Rp 978 miliar atau turun sebesar 45%. Kota Bekasi pada tahun 2016 memiliki PAD sebesar Rp 1.607 miliar, pada tahun 2017 hanya memiliki PAD sebesar Rp 677 miliar atau turun sebesar 42,2%, dan Kota Tangerang pada tahun 2016 memiliki PAD sebesar Rp 1.590 miliar, pada tahun 2017 hanya mencapai Rp 664 miliar atau turun sebesar 41,8%. (LIHAT LAMPIRAN 2).

Di tingkat kabupaten, terdapat dua daerah dengan tingkat penurunan PAD terbesar yaitu di Kab Bogor dengan persentase penurunan sebesar 55% dan Kab Tangerang dengan persentase penurunan sebesar 52%. (LIHAT LAMPIRAN 3).

2. Politisasi APBD

Tidak hanya perbaikan infrastruktur, peningkatan belanja sosial pada sektor yang berpotensi mengundang simpati publik menjelang pilkada patut menjadi sorotan. Hal tersebut tentu dapat merugikan publik luas karena bisa jadi proses tersebut tanpa didasari oleh aturan dan terkesan mengorbankan hal yang lebih prioritas. Menurut data oleh FITRA terdapat 9 kabupaten yang meningkatkan belanja hibah bansos di tahun 2017, rata-rata 9 daerah tersebut meningkatkan belanja bansos sebesar 35,4% menjelang pilkada.



3. Memanfaatkan Otoritas Jabatan

Calon kepala daerah yang berasal dari pejabat publik atau *incumbent* berpotensi memanikan otoritas jabatannya untuk memperluas pengaruhnya. seperti meningkatnya kunjungan kerja, banyaknya poster atau gambar calon kepala daerah di kegiatan/ program-program pemda, dan penerbitan izin terkait potensi daerah secara membabi buta, Pemberian izin adalah yang paling mudah dilakukan, karena prosesnya bisa langsung (tanpa lelang seperti penggunaan anggaran APBD), tidak mudah diselidiki karena kurang transparan, dan memiliki nominal yang besar terutama izin di sektor SDA (Sumber Daya Alam).

4. Penggerakan ASN (Aparatur Sipil Negera)

Mobilisasi ASN sangat memungkinkan dilakukan oleh *incumbent*, tidak hanya secara verbal mobilisasi juga bisa dibarengi dengan memberikan insentif berupa kenaikan belanja gaji atau honorarium. Peningkatan Belanja Tidak Langsung (BTL) atau belanja birokrasi merupakan hal yang sangat mudah dilakukan. Berdasarkan data oleh FITRA, rata-rata provinsi peserta pilkada memiliki peningkatan BTL sebesar 11% di tahun 2017, dimana Prov Sumatera Utara, Prov Jawa Barat, Prov Sulawesi Selatan, Prov Sumatera Selatan, dan Prov Papua merupakan provinsi dengan % peningkatan BTL terbesar. Sedangkan untuk tingkat kota, kota Padang Sidempuan, kota Palangkaraya, kota Bandung, Kota Pariaman, Kota Palembang, dan Kota Bau-bau merupakan kota dengan % peningkatan BTL terbesar. Terakhir, untuk tingkat kabupaten, terjadi peningkatan BTL rata-rata sebesar 14,5% di kabupaten peserta pilkada, dimana Kab Timor Tengah Selatan, Kab Subang, Kab, Sikka, Kab. Batu Bara, Kab. Dairi, dan Kab Kupang merupakan kabupaten dengan % peningkatan BTL terbesar. (LAMPIRAN 4).

REKOMENDASI:

1. Meminta KPU untuk tegas mendorong calon kepala daerah untuk membuka dana kampanye kepublik (baik *incumbent* atau *non incumbent*), ini merupakan bentuk terobosan transparansi anggaran untuk mengurangi potensi politik uang di pilkada.
2. KPK dan Kementerian Dalam Negeri bisa masuk untuk melakukan pengawasan kepada *incumbent* atau petahan karena berpotensi memainkan otoritas jabatan seperti politisasi APBD, mobisasi ASN, dan pemberian izin yang membabi buta karena bisa berdampak negatif di kemudian hari.
3. Mendorong lembaga audit negara atau daerah (BPK dan BPKP) agar tetap netral, apa lagi menjelang pilkada, karena bisa jadi dimanfaatkan oleh petahana dalam upaya melakukan rekayasa keuangan.
4. Penurunan PAD di barengi dengan peningkatan belanja tidak langsung, merupakan evaluasi yang harus dilakukan daerah dan calon kepala daerah. Jangan sampai peningkatan dana transfer pusat hanya dibelanjakan untuk belanja birokrasi sehingga porsi belanja publik dan sektor produktif tidak banyak. Kepala daerah kedepan tentu harus memiliki visi dalam peningkatan pendapatan daerah dan melepas ketergantungan dana transfer daerah.

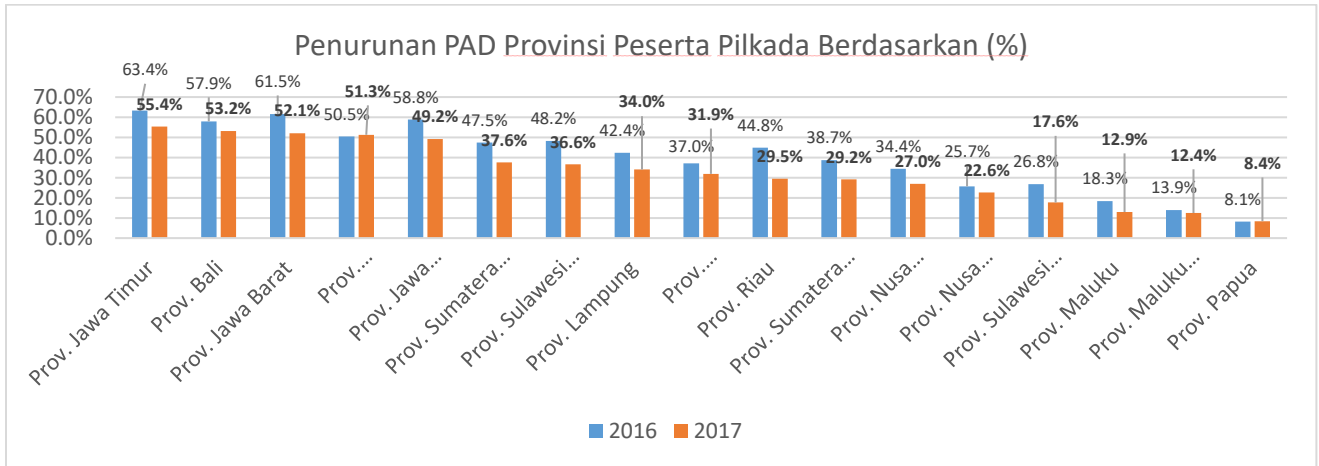
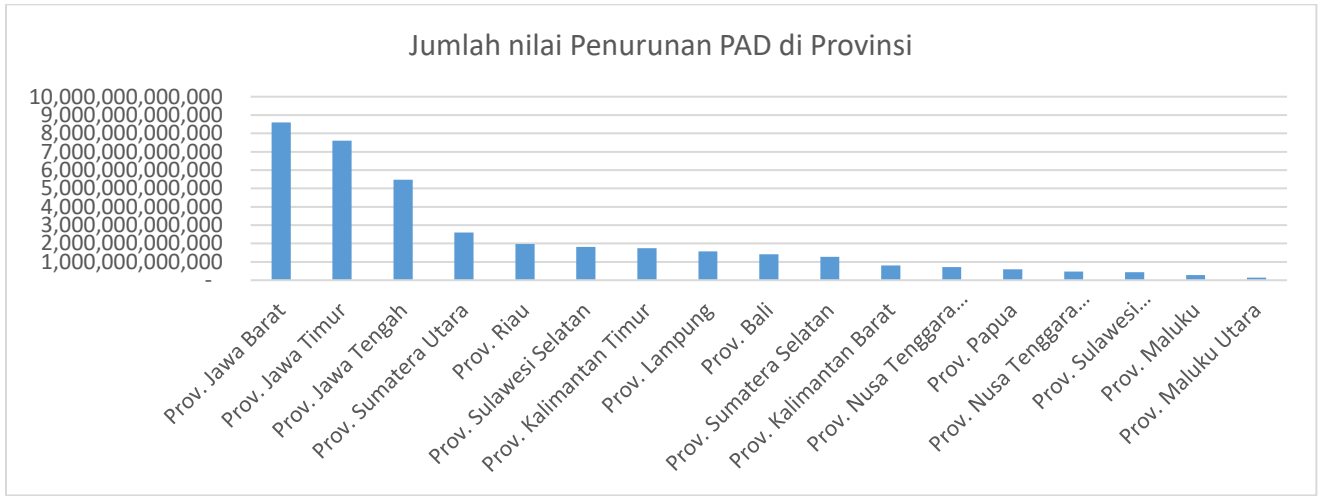
Salam taransparansi anggaran!!

CP : xxxxxxxxxxxxxxxx

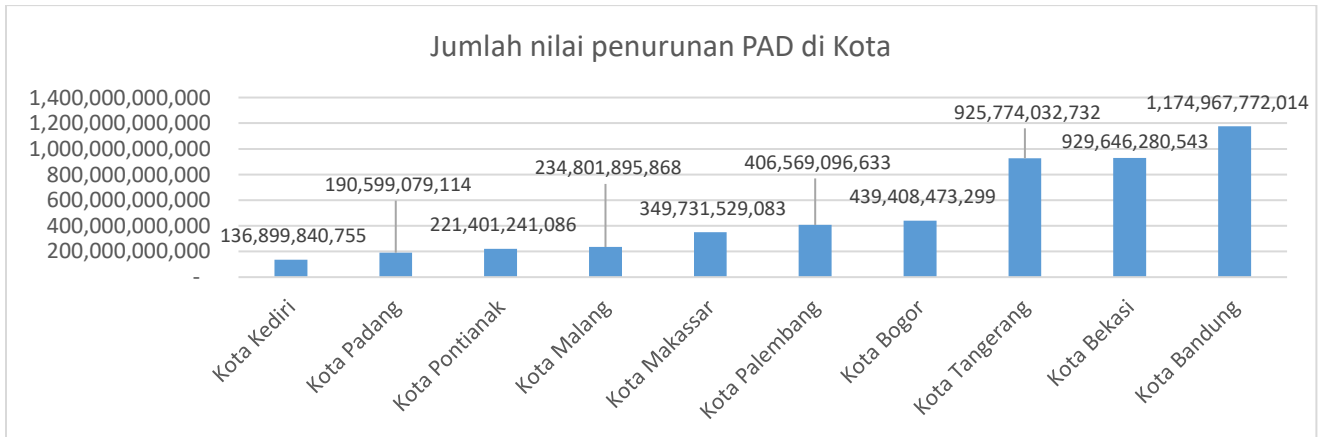
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

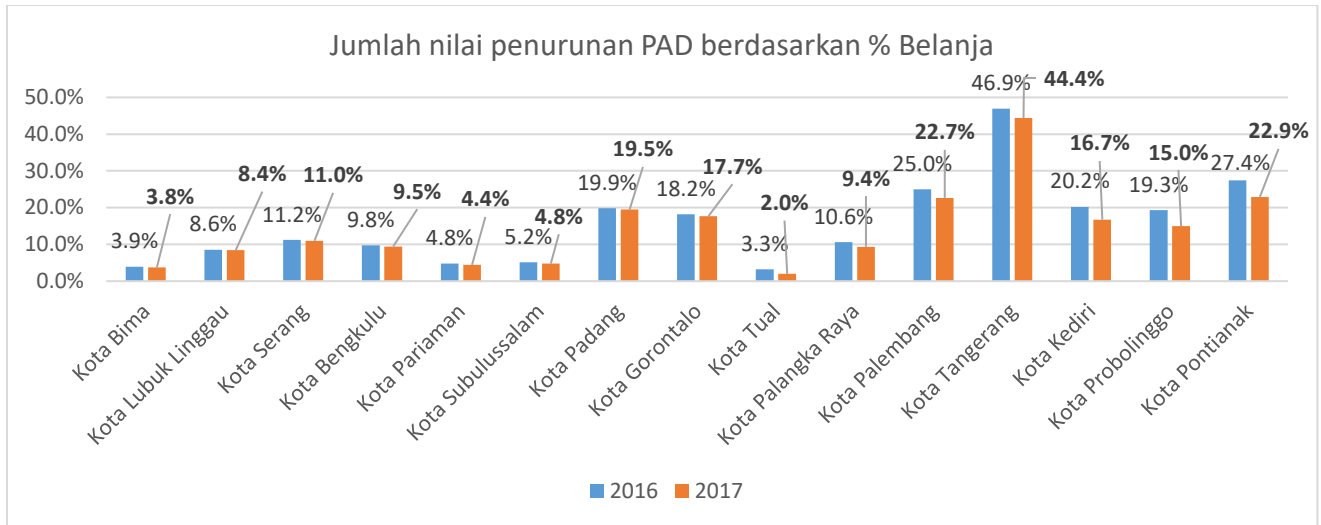
LAMPIRAN

Lampiran 1

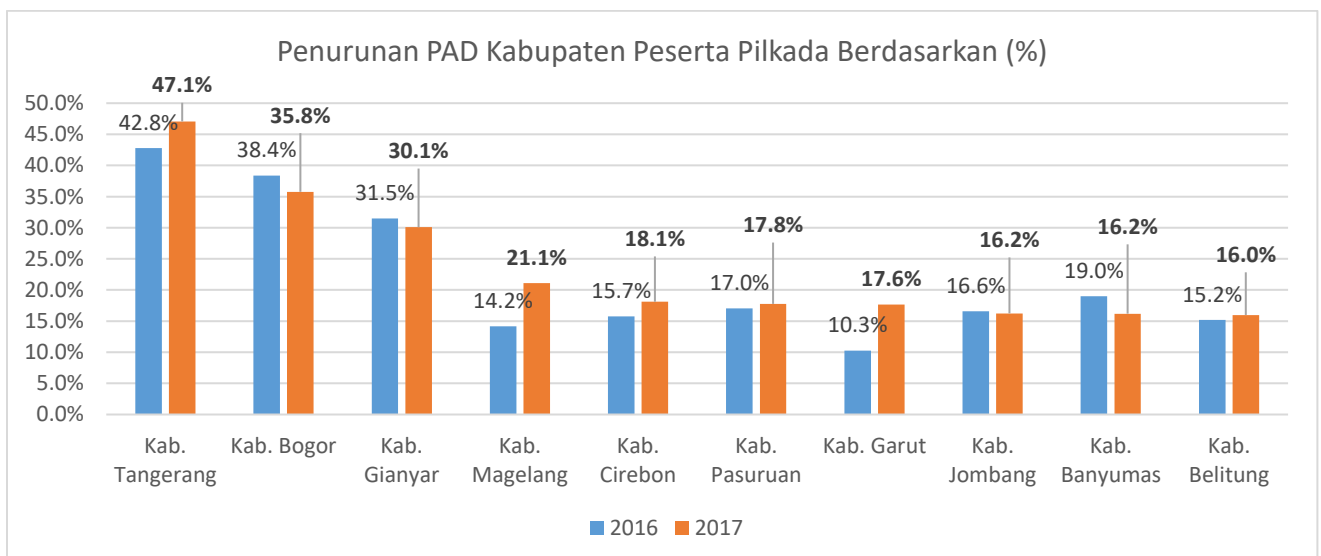
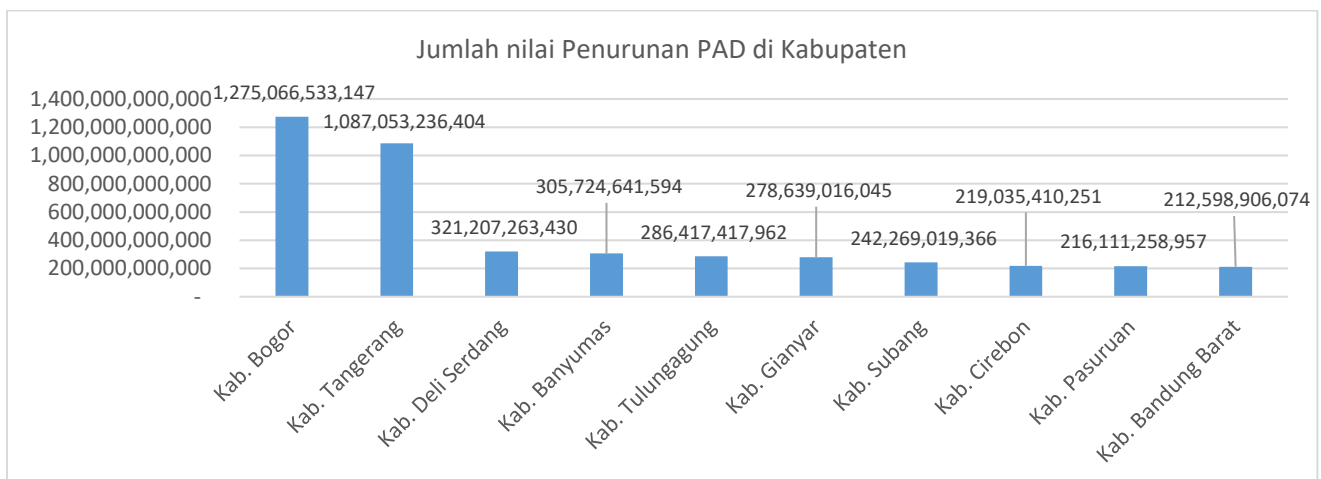


Lampiran 2





Lampiran 3



Lampiran 4

